

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi saat ini sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat. Kemajuan yang demikian pesat memudahkan komunikasi antar masyarakat di dunia. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara yang disebut pelayan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi, dan telekomunikasi oleh pelaksana pelayanan publik akan memudahkan rangkaian pelayanan publik yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan dan tulisan serta disajikan secara manual maupun elektronik. Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan pertimbangan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, penting bagi pemerintah untuk segera melaksanakan proses transformasi menuju E-Government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat

mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga Negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Pada periode ini pemerintah memiliki program pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau yang disebut e-KTP. Saat ini proses administrasi kependudukan di Indonesia dirasa masih kurang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pungutan liar dalam kepengurusan Kartu Tanda Penduduk oleh oknum pemerintah, dan yang paling bahaya adalah identitas di KTP bisa palsu, dan setiap warga negara bisa memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk di setiap daerah.

Hal ini membuat Kementerian Dalam Negeri membuat program e-KTP atau KTP elektronik dengan tujuan memiliki database valid yang benar mengenai identitas warganya dan juga setiap warga berhak hanya memiliki satu kartu identitas saja.

Pengembangan E-Government diseluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan diterbitkannya instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintahan yang berbasis ( menggunakan ) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government